I M E J
Innovations in Multidisciplinary Education Journal
Vol. 3, No. 2, November 2026, page: 140-147
E-ISSN: 3064-0180

Manajemen Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP RA Kartini Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai

Zahrotul husna[a,1], Putri syahri[b,2], Hotni Sari Harahap[c,3]
[a,b,c]*Universitas Alwashliyah Medan, Jl. Sisingamangaraja, Harjosari I, Medan Amplas, Medan City, North Sumatra*
[1]*hzahrotul2@gmail.com;* [2]*putrisyahri428@gmail.com;* [3]*hotnisari46@gmail.com*
*Corresponding Author: *hzahrotul2@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 12 Agustus 2026
Direvisi: 20 September 2026
Disetujui: 28 Oktober 2026
Tersedia Daring: 1 November 2026

Kata Kunci:
Manajemen kurikulum
Kurikulum Merdeka
Mutu pendidikan

ABSTRAK

Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan nasional telah dilaksanakan di berbagai satuan pendidikan sesuai edaran dan kebijakan pemerintah, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan keterbatasan pemahaman guru dalam implementasi kurikulum merdeka di SMP RA Kartini Sei Rampah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, serta ketua komite sekolah. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka telah berjalan sesuai prinsip dasarnya, tercermin dari pergeseran peran guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran berpusat pada siswa, penerapan asesmen diagnostik-formatif-sumatif secara terintegrasi, serta pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) secara konsisten. Peran manajemen sekolah dijalankan melalui perencanaan yang partisipatif, pengelolaan oleh kepala sekolah dalam tiga peran (pemimpin, fasilitator, pengawas), serta evaluasi multi-sumber yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua. Adapun kendala yang dihadapi meliputi variasi kompetensi guru dalam menyusun modul ajar, keterbatasan media pembelajaran, dan keragaman kemampuan belajar siswa, yang direspons sekolah melalui komunitas belajar guru, supervisi kolaboratif, pembelajaran berdiferensiasi, serta perluasan kerja sama dengan komite dan orang tua. Kesimpulannya, manajemen implementasi Kurikulum Merdeka di SMP RA Kartini Sei Rampah telah berjalan secara sistematis dan berdampak positif terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan, namun perlu terus diperkuat, khususnya pada aspek kesiapan teknologi digital dan keterlibatan orang tua secara lebih merata.

Keywords:
Curriculum management
Merdeka Curriculum
Quality of education

ABSTRACT

The Merdeka Curriculum, as a national policy, has been implemented in various educational institutions in accordance with government circulars and policies; however, its implementation in the field still faces various challenges, particularly regarding human resource readiness and teachers' limited understanding of how to implement the Merdeka Curriculum at RA Kartini Junior High School in Sei Rampah. This study employed a descriptive qualitative approach using a case study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the principal, the vice principal for curriculum, teachers, and the chair of the school committee. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification, with data validity checked through source triangulation and methodological triangulation. The research results indicate that the

I M E J
Innovations in Multidisciplinary Education Journal
Vol. 3, No. 2, November 2026, page: 140-147
E-ISSN: 3064-0180

implementation of the Merdeka Curriculum has proceeded in accordance with its basic principles, as reflected in the shift in the teacher's role to that of a facilitator in student-centered learning, the integrated application of diagnostic, formative, and summative assessments, and the consistent implementation of the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5). The role of school management is carried out through participatory planning, administration by the principal in three roles (leader, facilitator, supervisor), and multi-source evaluation involving teachers, students, and parents. The challenges faced include variations in teachers' competencies in developing instructional modules, limited learning resources, and the diversity of students' learning abilities, which the school addresses through teacher learning communities, collaborative supervision, differentiated instruction, and expanded collaboration with the school committee and parents. In conclusion, the management of the Merdeka Curriculum implementation at RA Kartini Junior High School in Sei Rampah has proceeded systematically and has had a positive impact on efforts to improve the quality of education; however, it needs to be further strengthened, particularly in terms of digital technology readiness and more equitable parental involvement.

©2026, Zahrotul Husna, Putri syahri, Hotni Sari Harahap
This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Mutu pendidikan merupakan isu sentral yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali negara maju sekalipun. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menekankan pentingnya kualitas guru, kurikulum relevan, dan kesiapan kerja lulusan agar mampu bersaing di pasar global. Negara-negara maju telah menata sistem pendidikan mereka agar adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga mutu pendidikan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan nasional (Harahap, 2026).

Indonesia sebagai negara berkembang, persoalan mutu pendidikan menjadi isu paling krusial. Hal ini tidak terlepas dari gambaran mutu dari Programme for International Student Assessment (PISA) yang secara berkala mengukur literasi membaca, matematika, dan sains setiap tiga tahun sekali. Hasil PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa skor siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara OECD, terutama dalam aspek literasi membaca, matematika, dan sains, dengan skor literasi membaca Indonesia sebesar 359, sains 383, dan matematika 366 (Rismawati Silvia, 2024).

Di era pendidikan saat ini, peningkatan kualitas tidak hanya dilihat dari hasil akademik, tetapi juga dari keberhasilan pendidikan dalam mengembangkan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis para siswa (Sukesi, dkk., 2025). Pendapat lain menjelaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan bukan lagi sekadar pilihan internal kelembagaan, melainkan sebuah keharusan mutlak agar lembaga pendidikan mampu bertahan dan bersaing secara kompetitif (Prasetiyawati dkk., 2023).

Faktanya, beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi kendala struktural yang serupa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Laporan Bank Dunia mencatat bahwa tingkat ketidakmampuan belajar (learning poverty) yaitu ketidakmampuan anak usia 10 tahun untuk membaca dan memahami bahan bacaan yang sesuai dengan usianya berada di atas angka 50 persen pada 14 dari 22 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia, Myanmar, Kamboja, dan Filipina, dengan kualitas pendidikan yang secara konsisten masih tergolong rendah di daerah pedesaan dan daerah miskin dibandingkan daerah perkotaan dan daerah yang lebih kaya.

I M E J
Innovations in Multidisciplinary Education Journal
Vol. 3, No. 2, November 2026, page: 140-147
E-ISSN: 3064-0180

Menghadapi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menempuh berbagai upaya sistemik dalam kerangka kebijakan besar bernama Merdeka Belajar, yang hingga kini telah mencapai sembilan belas episode kebijakan yang menyentuh berbagai aspek transformasi pendidikan. Di antara sembilan belas episode tersebut, tiga terobosan yang dinilai paling esensial karena berhubungan langsung dengan upaya peningkatan mutu pendidikan adalah Asesmen Nasional sebagai pengganti Ujian Nasional, Kurikulum Merdeka, dan Rapor Pendidikan platform yang menampilkan hasil Asesmen Nasional sebagai bahan refleksi satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan perbaikan berbasis data.

Sebagai salah satu pilar utama upaya peningkatan mutu tersebut, Kurikulum Merdeka dikembangkan sejak tahun 2020 dan diterapkan serta dievaluasi secara bertahap sejak 2021, mula-mula berpijak pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, yang kemudian diubah melalui Kepmendikbudristek Nomor 262/M/2022, dengan penetapan satuan pendidikan pelaksana secara bertahap tiap tahun ajaran melalui keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Kepastian hukum yang lebih kuat kemudian hadir melalui Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, yang menjadi payung hukum implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional dengan tenggat penerapan wajib paling lambat tahun ajaran 2026/2027.

Keberhasilan sebuah kebijakan kurikulum di tingkat pusat pada akhirnya sangat bergantung pada bagaimana satuan pendidikan mengelolanya. Maka, manajemen mengambil peran penting dalam menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan bermutu dalam suatu lembaga pendidikan dengan mengatur jalannya institusi pendidikan mulai dari proses planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) dan controlling (pengendalian) sumber daya sekolah dalam mencapai visi misi atau tujuan sekolah (Sufiah dan Muhaimin, 2009). Berbagai penelitian terkini turut mengonfirmasi peran strategis manajemen kurikulum dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di berbagai jenjang pendidikan. Penelitian Siregar, Manalu, dan Gultom (2026) di SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan menemukan bahwa implementasi manajemen kurikulum telah berjalan pada setiap fungsi POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), namun belum optimal pada aspek perencanaan masih terdapat ketimpangan pemahaman guru akibat keterbatasan pelatihan, sementara pada aspek pengawasan, supervisi masih dominan pada pemeriksaan administrasi dibandingkan observasi langsung di kelas.

Temuan serupa dilaporkan oleh Meliza, Siraj, dan Zahriyanti (2024) pada sekolah dasar di Kabupaten Bireuen, yang mengungkapkan bahwa meskipun ketersediaan sumber daya dan koordinasi antarinstansi sudah cukup baik, pemahaman guru masih rendah terkait teknologi informasi dan guru belum memiliki kesiapan yang memadai untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di era digital. Sebaliknya, penelitian Gobe, Anwar, dan Sayafar (2026) di SMA Negeri 1 Kabila menunjukkan bahwa ketika manajemen kurikulum mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi dijalankan secara sistematis dan didukung komitmen kepala sekolah serta profesionalisme guru, implementasi Kurikulum Merdeka mampu berjalan efektif dan berkontribusi pada pembentukan karakter maupun mutu pembelajaran peserta didik.

Penelitian Diah (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan kurikulum merdeka yang efektif berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan memenuhi standar nasional dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta kondisi lingkungan sekolah. Meskipun secara regulatif Kurikulum Merdeka telah diberlakukan dan dilaksanakan sesuai dengan edaran serta kebijakan pemerintah di hampir seluruh satuan

pendidikan, pelaksanaannya di lapangan masih diwarnai berbagai tantangan meliputi rendahnya kesiapan tenaga pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman dari para pemangku kepentingan (Arini, 2025). Sucipto (2024) menemukan bahwa sarana prasarana yang belum menunjang, SDM guru yang perlu ditingkatkan dalam penggunaan teknologi, kesulitan melakukan evaluasi pembelajaran, kondisi siswa, orang tua, dan lingkungan, serta ketimpangan antarwilayah menjadi tantangan yang berulang.

Fenomena ini turut teramati di SMP RA Kartini Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah melaksanakan Kurikulum Merdeka sesuai dengan edaran dan kebijakan pemerintah. Guru mulai melaksanakan projek berbasis Profil Pelajar Pancasila, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana, variasi kompetensi guru, serta adaptasi terhadap teknologi digital. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama dalam supervisi, motivasi, dan fasilitasi inovasi pembelajaran. Kondisi ini mencerminkan bahwa manajemen implementasi kurikulum menjadi faktor krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti mengamati langsung kondisi di lapangan dan melibatkan informan untuk memberikan informasi yang mencerminkan keadaan alami tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Peneliti fokus pada pengamatan terhadap situasi. Dalam penelitian ini, peneliti berinteraksi langsung dengan subjek untuk memahami fenomena secara lebih akurat dan tepat. Data yang dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek terkait manajemen kurikulum merdeka dalam usaha peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun informan kunci adalah Kepala Sekolah SMP RA Kartini Sei Rampah, informan utama, yaitu Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum serta beberapa guru yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Merdeka, termasuk fasilitator Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Serta informan tambahan, yaitu perwakilan peserta didik dan/atau komite sekolah, untuk memperoleh sudut pandang tambahan mengenai dampak implementasi Kurikulum Merdeka terhadap proses pembelajaran. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen, arsip, maupun literatur yang relevan dengan fokus penelitian seperti data pendukung berupa dokumen sekolah seperti Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), modul ajar, jadwal pembelajaran, laporan hasil asesmen, serta dokumentasi kegiatan P5.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri atas tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan kriteria keabsahan data menurut Lincoln dan Guba yakni kredibilitas, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP RA Kartini Sei Rampah telah mencerminkan tiga karakteristik utama kurikulum ini, yaitu pergeseran peran guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran berpusat pada siswa, penerapan asesmen yang terintegrasi (diagnostik, formatif, sumatif), serta penguatan karakter melalui

I M E J
Innovations in Multidisciplinary Education Journal
Vol. 3, No. 2, November 2026, page: 140-147
E-ISSN: 3064-0180

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema-tema kontekstual seperti lingkungan hidup, literasi, dan kewirausahaan sederhana.

Temuan ini sejalan dengan karakteristik Kurikulum Merdeka yang dikemukakan Sulistyani dan Mulyono (2022), khususnya pada aspek pembelajaran berbasis proyek untuk membangun karakter dan penerapan prinsip teaching at the right level yang tampak jelas pada praktik asesmen diagnostik sebagai dasar penyesuaian metode mengajar. Jika dibandingkan dengan penelitian Gobe, Anwar, dan Sayafar (2026) di SMA Negeri 1 Kabila yang juga menemukan bahwa P5 efektif menumbuhkan inisiatif dan tanggung jawab siswa melalui kegiatan lingkungan dan kepramukaan, temuan di SMP RA Kartini Sei Rampah menunjukkan pola serupa siswa berinisiatif dalam kampanye kebersihan dan pengelolaan pojok baca tanpa arahan berlebihan dari guru.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap kesenjangan yang sejalan dengan temuan Siregar, Manalu, dan Gultom (2026) di SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan, yaitu adanya keterbatasan pada sisi kesiapan teknologi digital, baik pada guru maupun sebagian siswa, serta keterlibatan orang tua dalam kegiatan P5 yang masih terbatas. Kesenjangan ini menegaskan bahwa meskipun secara substantif pelaksanaan Kurikulum Merdeka telah berjalan sesuai prinsip dasarnya, keberhasilannya belum sepenuhnya merata pada seluruh aspek, khususnya pada dimensi kesiapan infrastruktur digital dan partisipasi eksternal.

Peran Manajemen Sekolah dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka

Pada aspek manajemen, penelitian ini menemukan bahwa ketiga fungsi utama manajemen kurikulum perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi—telah dijalankan secara sistematis dan saling berkesinambungan di SMP RA Kartini Sei Rampah. Perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui forum rapat yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru; pengelolaan dijalankan kepala sekolah melalui tiga peran yang saling terintegrasi, yaitu pemimpin, fasilitator, dan pengawas; sedangkan evaluasi dilaksanakan secara multi-sumber dengan melibatkan guru, siswa, dan orang tua. Temuan ini secara konsisten mencerminkan ruang lingkup manajemen kurikulum sebagaimana dikemukakan Rusman (2009), yang menegaskan bahwa manajemen kurikulum yang baik mencakup siklus perencanaan hingga evaluasi yang saling terkait, serta sejalan dengan prinsip demokratisasi dan kooperatif yang menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada posisi yang proporsional dalam pengelolaan kurikulum. Temuan mengenai tiga peran kepala sekolah (pemimpin, fasilitator, pengawas) ini juga selaras dengan hasil penelitian Andriani dan Dafit (2024), yang menemukan bahwa kepala sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka menjalankan empat peran utama perencana, pelaksana, supervisor, dan leader. Ketiga peran yang ditemukan di SMP RA Kartini Sei Rampah pada dasarnya merupakan cerminan dari keempat peran tersebut, dengan peran perencana tercermin pada aspek perencanaan yang telah dibahas secara terpisah.

Menariknya, jika dibandingkan dengan temuan Siregar, Manalu, dan Gultom (2026) yang menemukan bahwa supervisi di SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan masih dominan bersifat administratif dibandingkan observasi langsung di kelas, supervisi di SMP RA Kartini Sei Rampah justru menunjukkan orientasi yang lebih pedagogis kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum secara eksplisit menyatakan bahwa supervisi dilakukan melalui observasi kelas langsung dan diskusi reflektif, bukan sekadar pemeriksaan kelengkapan dokumen. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kualitas pelaksanaan fungsi manajemen kurikulum dapat bervariasi antarsekolah meskipun sama-sama berada di bawah payung kebijakan nasional yang identik, sehingga menegaskan pentingnya kepemimpinan di tingkat satuan pendidikan sebagai variabel penentu sejalan dengan faktor kepemimpinan kepala sekolah yang dikemukakan Danim sebagai faktor utama pembentuk mutu pendidikan, serta

I M E J
Innovations in Multidisciplinary Education Journal
Vol. 3, No. 2, November 2026, page: 140-147
E-ISSN: 3064-0180

konsep continuous improvement dari Sallis yang menekankan bahwa perbaikan mutu harus dilakukan secara terus-menerus melalui evaluasi yang substantif, bukan formalitas.

Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini variasi kompetensi guru dalam menyusun modul ajar, keterbatasan media pembelajaran, serta keragaman kemampuan belajar siswa secara konsisten sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang telah dibahas pada BAB II. Kajian dalam Arini: Jurnal Ilmiah dan Karya Inovasi Guru maupun Indo Green Journal sama-sama menemukan bahwa keterbatasan sarana dan kesiapan tenaga pendidik menjadi tantangan berulang dalam implementasi Kurikulum Merdeka di berbagai jenjang dan wilayah. Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa kendala tersebut bersifat struktural dan umum dihadapi satuan pendidikan di Indonesia, bukan persoalan yang unik hanya terjadi di SMP RA Kartini Sei Rampah.

Meskipun demikian, yang membedakan adalah bagaimana sekolah meresponsnya. Solusi yang ditempuh pembentukan komunitas belajar guru, supervisi kolaboratif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, serta perluasan jaringan kerja sama dengan komite dan orang tua mencerminkan penerapan nyata dari faktor-faktor pembentuk mutu pendidikan yang dikemukakan Danim, khususnya pada aspek kompetensi guru yang ditingkatkan melalui kegiatan kolaboratif dan jaringan kerja sama lintas pihak. Pola penanganan kendala yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga membangun mekanisme berkelanjutan seperti komunitas belajar guru, menunjukkan bahwa SMP RA Kartini Sei Rampah telah menerapkan prinsip continuous improvement Sallis di mana perbaikan mutu dilakukan secara terus-menerus berdasarkan kebutuhan riil yang muncul dari lapangan, bukan sekali jadi.

Berdasarkan ketiga pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa manajemen implementasi Kurikulum Merdeka di SMP RA Kartini Sei Rampah telah menunjukkan kesesuaian yang cukup kuat dengan kerangka teoretis manajemen kurikulum maupun temuan penelitian terdahulu, khususnya pada aspek partisipasi dalam perencanaan, kepemimpinan kepala sekolah yang multiperan, serta evaluasi yang bersifat holistik. Namun demikian, penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan kurikulum nasional pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas manajemen di tingkat satuan pendidikan, bukan semata oleh keberadaan regulasi itu sendiri. Kendala yang masih tersisa, terutama pada dimensi kesiapan teknologi digital dan keterlibatan orang tua, menjadi ruang perbaikan yang perlu terus diupayakan sekolah secara berkelanjutan agar manajemen implementasi Kurikulum Merdeka benar-benar dapat berkontribusi optimal terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP RA Kartini Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP RA Kartini Sei Rampah telah sesuai prinsip dasarnya, tercermin dari pergeseran peran guru menjadi fasilitator, penerapan asesmen terintegrasi (diagnostik, formatif, sumatif), serta pelaksanaan P5 secara konsisten. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata, ditandai kesenjangan kompetensi digital dan keterlibatan orang tua dalam P5 yang masih terbatas. Kemudian manajemen sekolah menjalankan tiga fungsi yang berkesinambungan: perencanaan partisipatif melalui rapat bersama, pengelolaan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin-fasilitator-pengawas, serta evaluasi multi-sumber yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua. Ketiganya menunjukkan manajemen kurikulum telah dijalankan secara sistematis sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Adapun kendala yang dihadapi meliputi variasi kompetensi guru dalam menyusun modul ajar, keterbatasan media pembelajaran, dan keragaman kemampuan belajar siswa. Sekolah meresponsnya melalui

komunitas belajar guru, supervisi kolaboratif, pembelajaran berdiferensiasi, serta perluasan kerja sama dengan komite dan orang tua.

5. Daftar Pustaka

Ali, N. (2021). Pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran pada sekolah kejuruan di lingkungan pesantren. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(1), 2247.

Anggraena, Y., dkk. (2021). Kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Angelya, A. A., dkk. (2022). Pengorganisasian dalam manajemen pendidikan. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, 2(3), 97–105.

Arini: Jurnal Ilmiah dan Karya Inovasi Guru. (2025). Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar: Tantangan dan peluang dalam implementasi di Sekolah Menengah Pertama. https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/arini/article/view/313

Creswell, J. W. (2019). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (terj.). Pustaka Pelajar.

GTK Kemdikbud. (2022). Merdeka Belajar terus bergerak menciptakan terobosan pendidikan Indonesia. https://gtk.dikdasmen.go.id/read-news/merdeka-belajar-terus-bergerak-menciptakan-terobosan-pendidikan-indonesia

Gobe, S., Anwar, H., & Sayafar, D. (2026). Implementasi manajemen Kurikulum Merdeka dalam membentuk karakter disiplin siswa di SMA Negeri 1 Kabila, Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Hulonthalo Journal of Islamic Studies (HJIS), 1(2), 263–283.

Griffin, R. W. (2002). Management. Houghton Mifflin.

Halimah, L. (2020). Pengembangan kurikulum dan pembelajaran di era globalisasi (2nd ed.). Refika Aditama.

Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. (2023). Rapor Pendidikan: Alat ukur komprehensif pendidikan di Indonesia. https://dev-itjen.kemdiktisaintek.go.id/rapor-pendidikan-alat-ukur-komprehensif-pendidikan-di-indonesia/

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. (2022).

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022. (2022).

Kholilurrokhman, D. (2024). Implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Bangil [Tesis magister, Universitas Negeri Malang].

Kristiawan, M., Safitri, D., & Lestari, R. (2021). Manajemen pendidikan. Deepublish.

Meliza, Siraj, & Zahriyanti. (2024). Implementasi manajemen Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen. Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran (JPPP), 5(2), 127–168. https://doi.org/10.30596/jppp.v5i2.17397

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2020). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Muhaimin, Sutiah, & Prabowo, S. L. (2009). Manajemen pendidikan. Kencana.

Nasbi, I. (2020). Manajemen kurikulum. Jurnal Idaarah, 1(2), 319.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. (2024).

Prasetiyawati, D., Hariyanti, D., Fakhruddin, F., Kardoyo, K., & Mintarsih. (2023). Menuju era globalisasi pendidikan: Tantangan dan harapan terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES, 222–225.

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Kemendikdasmen. (t.t.). Rapor Pendidikan. https://pskp.kemendikdasmen.go.id/rapor-pendidikan

Rosidah, H. T., dkk. (2021). Analisis kesiapan guru mengimplementasikan asesmen. *Jurnal Pendidikan Dasar*, *12*(1), 87–103.

Rosiana, T. (2020). *Implementasi manajemen kurikulum di SMP Aisyiyah Boarding School Malang* [Tesis, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang].

Roziqin, Z. (2019). Menggagas perencanaan kurikulum sekolah unggul. *As-Sabiqun*, *1*(1), 44–56.

Siregar, S. A. M., Manalu, M. T. H., & Gultom, F. Y. (2026). Analisis kesenjangan implementasi manajemen Kurikulum Merdeka berdasarkan fungsi POAC di SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan. *Invention: Journal Research and Education Studies*, *7*(1), 311–318. https://doi.org/10.51178/invention.v7i1.3393

Sucipto. (2024). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Systematic literature review. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*. https://jurnal.uns.ac.id/jkc/article/view/84353

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sulistyani, F., & Mulyono, R. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) sebagai sebuah pilihan bagi satuan pendidikan: Kajian pustaka. *Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*.

Syam, A. R. (2011). Posisi manajemen kurikulum dan pembelajaran dalam pendidikan. *MUADDIB: Studi Kependidikan dan Keislaman*, *7*(1), 33–46.

Triwayanto. (2022). Manajemen kurikulum dan pembelajaran. *Jurnal Pendidikan*, *1*(4).